

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI SAPI SAKIT YANG DIJUAL DENGAN SISTEM *BRANDU*
(STUDI KASUS DESA TRI TUNGAL JAYA, KECAMATAN WAY
SERDANG, KABUPATEN MESUJI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ilmu Syariah**

**OLEH:
SUCIPTO**

NPM : 1621030222

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI SAPI SAKIT YANG DIJUAL DENGAN SISTEM *BRANDU*
(STUDI KASUS DESA TRI TUNGAL JAYA, KECAMATAN WAY
SERDANG, KABUPATEN MESUJI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Asuransi ternak merupakan asuransi yang mungkin masih baru terdengar dan masih banyak orang yang tidak tahu. Asuransi ternak hadir bagi mereka yang mempunyai usaha ternak baik skala kecil maupun skala yang besar dimana dengan adanya asuransi permasalahan-permasalahan dalam melakukan usaha ternak bisa dihindari dengan asuransi ini. Namun dalam hal ini, perjanjian awal dengan pelaksanaan asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* tidak sesuai. Di mana, dalam perjanjian awal dari pihak penanggung akan memberikan uang polis sebesar Rp. 10.000.000;- apabila sapi mati karena sakit. Namun karena sapi belum mati tetapi masih dalam keadaan sakit lalu disembelih, maka jika sapi yang ditawarkan tersebut dibeli oleh masyarakat dengan sistem *brandu* senilai Rp. 2.000.000;- maka pihak asuransi akan hanya memberikan polis sebesar Rp. 8.000.000;- untuk menutupi kekurangannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya adalah *diskriptif analisis*, sumber datanya yaitu data lapangan. Populasinya adalah penanggung dan tertanggung. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik pengolahan datanya melalui *editing* dan sistematika data. Analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* dengan pendekatan *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pembayar klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* ditinjau dari perspektif hukum Islam praktiknya diperbolehkan Sebab, selama tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan tidak merugikan pihak manapun. Berkaitan dengan hal ini asuransi hewan sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah, karena di dalamnya telah memenuhi *ta'a>wun* yang merupakan tolong menolong, dan juga *tabarru'* yang merupakan akad kebaikan (dana sosial).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto

NPM : 1621030222

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit Yang Dijual Dengan Sistem *Brandu* (Studi kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis,

Sucipto

NPM: 1621030222



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Sucipto

NPM : 1621030222

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
KLAIM ASURANSI SAPI SAKIT YANG DIJUAL DENGAN
SISTEM BRANDU**(Studi kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan
Way Serdang, Kabupaten Mesuji)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Yusuf Balhaqi, Lc., M.A.
NIP.197403072000121002


Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I.
NIP.:

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SAPI SAKIT YANG DIJUAL DENGAN SISTEM BRANDU** (Studi kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji) disusun oleh, Sucipto, NPM: 1621030222 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Lampung pada hari/Tanggal: Senin, 14 September 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

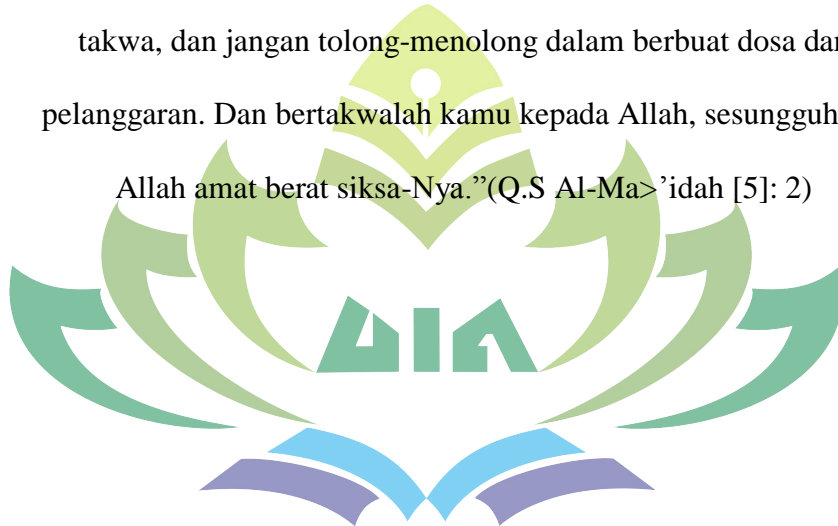


Dr. **Khairuddin, M.H**
NPM.196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Ma'idah [5]: 2)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu yang menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku yang tak terhingga, kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suratman dan Ibunda Sriyati yang telah membersarkanku, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak perempuanku Susanti, S.Kom, dan kakak laki-lakiku Dul Wahid, A.Md dan keponakanku satu-satunya Afriyan Wahid, yang selalu memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sucipto, lahir di desa Kejadian, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji pada tanggal 26 Juni 1996, anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suratman dan Ibu Sriyati. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 7 Kalianda dari kelas I hingga kelas IV dan melanjutkan kelas V sampai dengan selesai pada tahun 2010 di SD Negeri 1 Kejadian, Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Way Serdang selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Serdang selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 1437 H/2016M.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit Yang Dijual Dengan Sistem Brandu (Studi kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut Beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M. Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung;

4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi;
5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I selaku Pembimbing II yang selama ini dengan tulus telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya Jurusan Muamalah;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabat IMA (Ikatan Mahasiswa Alumni) SMA Negeri 1 Way Serdang yang sudah memberi semangat, motivasi dan doa untuk keberhasilanku;
9. Sahabat-sahabat yang selalu penulis sayangi Reni Deska Sari, S.H., Nadya Fitri Asyifa, Febri Rohmat Habibi, S.H, Faisal Nugraha, Muhammad Rafi Alqodar, Daprianto, S.H., Ahmad Bustomi, Didik Mei Sarnanda, S.H., Krismon Anang Saputra, M. Arif Darmawan, Jopi Windarsah, Tri Hamli Agus, S.H., Olyvia Devita Pertiwi S.H., Dwi Monica Apriani., Hidayah Yulianty Harjono, S.H, Alm. Hikmah Lidaeni, Aulia Rahmah S.H., Novita Sari, S.H., Bunga Oktalia, S.H., Sony Oktavian, S.H, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah memberi semangat, motivasi dan doa untuk keberhasilanku;

10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Muamalah C 2016 yang telah membantu penulisan baik tenaga, motivasi semangat untuk penyelesaian skripsi ini. Rekan-rekan KKN Kelompok 46 dan 47 Desa Buana Sakti, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur Ahmad Rifa'i, Annisa Wahyuni, Cindy Septiani, Darwin Wijaya, Della Nuraini, Desi Agnesia Zamzani, Fitri Rahmawati, Husnul Fadillah, Keni Dian Nata, Muhammad Iqbal, Riami Amini Aru, S.E., Yuliana Ella Puspita, Penti Dahlina, Anggun Ulandari, S.Pd., Eka Permata Sari, S.H., Ayu Anggreni, S.H., dan keluarga besar desa Buana Sakti Lampung Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang berada di kampung halaman tercinta Ria Anwar Sanusi, Muhammad Komaidin, Ahmad Sodikin, Lusiana Dewi, S.Pd, Dika Apriyanto, Masriko, Zulian Rustanto, Wawan Setiawan, Abdi Es Awan, Hendi Cahyono, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Almamater tercinta
- Penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2020

Penulis,

Sucipto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PEGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Asuransi Konvensional	
a. Pengertian Asuransi Konvensional	15
b. Dasar Hukum Asuransi Konvensional	17
c. Jenis-jenis Asuransi Konvensional	19
2. Asuransi Syariah	
a. Pengertian Asuransi Syariah	21
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	23
c. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	30
d. Sistem Klaim Asuransi Syariah	34
e. Manfaat Asuransi Syariah.....	40
f. Risiko Asuransi Syariah.....	41
3. Perbedaan Asuransi konvensional dengan Asuransi Syariah	42
4. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	
a. Organisasi Pelaksanaan.....	44
b. Tujuan dan Sasaran	46

c. Pelaksanaan.....	46
d. Mekanisme Pelaksanaan	48
5. Dampak Mengonsumsi Daging Hewan Sapi Sakit Virus Jembrana Menurut Sains	51
B. Tinjauan Pustaka.....	52

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil Desa Tri Tunggal Jaya	56
2. Kondisi Geografis Desa Tri Tunggal Jaya.....	57
3. Kondisi Demografis Desa Tri Tunggal Jaya.....	58
4. Struktur Organisasi Desa Tri Tunggal Jaya	59
B. Praktik Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit yang Dijual Dengan Sistem Brandu	
1. Gambaran Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Desa Tri Tunggal Jaya	61
2. Prosedur Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	63

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit yang Dijual Dengan Sistem Brandu	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit yang Dijual Dengan Sistem Brandu	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Jumlah Dusun di Desa Tri Tunggal Jaya	59
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	61
4. Struktur Organisasi Desa Tri Tunggal Jaya	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Riset UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah.
2. Surat Balasan Permohonan Riset Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.
3. Berita Acara Seminar Proposal.
4. Data Pertanyaan Wawancara Yang Diajukan Peneliti.
5. Surat Keterangan Wawancara.
6. Blanko Konsultasi Skripsi.
7. Hasil Cek Turnitin.
8. Dokumentasi Foto.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal mendapatkan gambaran yang jelas untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan atau salah penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan secara rinci terhadap arti dan makna istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit Yang Dijual Dengan Sistem Brandu (Studi kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)”. Ada beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk ditegaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam juga berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta’rif ini

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. IV*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Moh.Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 38.

mencakup hukum *syara'* dan juga mencakup hukum *fiqh*, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung di dalamnya.

Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga atau mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.³

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.⁴

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁵

Sapi adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipelihara untuk diambil daging dan susunya.⁶

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.⁷

Sistem adalah perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁸

³Pengertian Pembayaran (On-Line) tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran (22 Oktober 2019).

⁴Pengertian Klaim (On-Line) tersedia di: <https://id.wiktionary.org/wiki/klaim> (22 Oktober 2019)

⁵Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 (On-Line) tersedia di: <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum-dasar-dasar-hukum-asuransi/> (22 Oktober 2019).

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1225.

⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1320.

Brandu adalah istilah yang sering digunakan masyarakat suku Jawa untuk melakukan swadaya membeli hewan ternak yang akan disembelih dengan cara melakukan iuran.

Penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dari **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit yang Dijual Dengan Sistem *Brandu* (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)”** adalah suatu penelitian secara ilmiah terhadap pelaksanaan kewajiban tuntutan hak klaim asuransi ternak sapi sakit yang diperjualbelikan dengan sistem swadaya iuran masyarakat ditinjau dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dalam melakukan penelitian ini karena kegiatan asuransi merupakan kegiatan yang dianggap dapat menjamin risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan datang sehingga sebagian orang sudah mulai banyak melaksanakan asuransi untuk masa depan mereka.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif dalam melakukan penelitian ini karena permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan keilmuan yang sesuai dipelajari di Fakultas Syariah program studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Saat ini kegiatan asuransi menjadi suatu kegiatan yang dapat menjadi andalan untuk keberlangsungan masa depan. Asuransi dinilai dapat menjadi jawaban akan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan tidak bisa direka-reka seperti apa alurnya. Risiko seperti sakit, kematian, kerugian atau risiko yang lainnya adalah risiko yang tidak dapat dihindari serta bisa datang kapan saja dan hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi sebagian banyak orang.

Produk asuransi di era sekarang tidak hanya diperuntukan untuk manusia atau jiwa saja tetapi sudah lebih banyak hal-hal yang dapat diasuransikan seperti asuransi kendaraan, pendidikan, bisnis hingga sampai asuransi ternak. Dimana akan adanya macam-macam jenis asuransi ini sebagian orang dapat mendapat ketenangan untuk masa depan yang akan datang.

Dalam agama Islam asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas pada Al-Qur'an, tidak satupun ayat yang secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi, namun ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mempunyai muatan-muatan nilai praktik asuransi.

Ayat pada Al-Qur'an yang berkaitan dengan asuransi syariah memuat suatu perintah agar manusia dapat melaksanakan tolong-menolong antar

sesama umat manusia. Seperti halnya asuransi yang merupakan perjanjian di mana pihak penanggung memberikan pertolongan tertanggung apabila mengalami suatu musibah.

Asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini juga terbantu akan adanya kemajuan teknologi. Media informasi seakan-akan menjadi wadah untuk mempromosikan asuransi. Tidak hanya itu banyak bermacam-macam jenis asuransi dapat kita temui dari asuransi jiwa, properti, kendaraan hingga asuransi ternak yang membuat sebagian orang tenang akan masa yang akan datang.

Asuransi ternak merupakan asuransi yang mungkin masih baru terdengar dan masih banyak orang yang tidak tahu. Asuransi ternak hadir bagi mereka yang mempunyai usaha ternak baik skala kecil maupun skala yang besar dimana dengan adanya asuransi permasalahan-permasalahan dalam melakukan usaha ternak bisa dihindari dengan asuransi ini.

Asuransi ternak ini sudah berjalan di berbagai wilayah, tidak terkecuali pada desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Dimana pemerintahan setempat bekerjasama dengan salah satu pihak asuransi yang menangani asuransi ternak yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal dengan Jasindo yang berbentuk Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang sudah berjalan tiga tahun ini.

Apabila sapi yang sudah diasuransikan mengalami peristiwa mati sakit, mati karena kecelakaan hingga hilang di dalam kandang tanpa adanya

kelalaian dari pemilik maka pemilik ternak akan mendapatkan dana pengganti sebesar Rp. 10.000.000;-.

Namun, ada yang berbeda pada praktik yang terjadi di lapangan. Peternak sapi yang sudah mendaftarkan sapinya kepada pihak asuransi dapat mengajukan klaim apabila sapi mereka dalam keadaan sakit dan belum mati. Klaim ini pun sedikit unik di mana sapi yang sakit tersebut akan ditawarkan untuk dijual kepada masyarakat dengan cara melakukan *brandu* kegiatan swadaya bersama untuk membeli sapi dengan cara iuran untuk mendapatkan sapi sakit tersebut.

Apabila sudah sepakat dengan masyarakat mengenai harga sapi lalu sapi disembelih maka pemilik sapi bisa mengajukan klaim dengan ketentuan pihak asuransi akan membayarkan kekurangan tanggungannya yang sudah dipotong oleh swadaya masyarakat tersebut. Dengan contoh saat perjanjian awal akan diberikan uang klaim sebesar Rp. 10.000.000;- apabila sapi mati karena sakit namun karena sapi belum mati tapi masih dalam keadaan sakit lalu disembelih, maka jika sapi yang ditawarkan tersebut dibeli oleh masyarakat dengan sistem *brandu* senilai Rp. 2.000.000;- maka pihak asuransi akan memberikan klaim sebesar Rp. 8.000.000;- untuk menutupi kekurangannya. Hal ini dilakukan dengan alasan dari pada sapi mati sia-sia dan dagingnya menjadi bangkai maka sebelum mati sapi yang sakit tersebut dijual-belikan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap masalah ini perlu diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* bagaimana syariat hukum Islam dalam menyikapi permasalahan di atas. Penelitian pembahasan ini juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu memberi kejelasan terhadap pelaksanaan asuransi ternak untuk kedepannya.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

2. Batasan Penelitian

Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul diatas yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit yang Dijual Dengan Sistem *Brandu* (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen khususnya dalam praktik pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* menurut Hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden. Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung sebagai pendukung penelitian ini menggunakan kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.¹⁰ Artinya dengan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat

⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), h. 6.

¹⁰Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fisafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan hukum dari pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Hal ini data primer diperoleh peneliti bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu* adalah di desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis

adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqh, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹¹ Observasi dilakukan secara langsung sesuai fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pihak yang pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginterventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.¹²

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Populasi ini adalah seluruh pihak baik penanggung dan tertanggung yang melakukan asuransi ternak sapi adalah 76 orang terdiri dari 2 orang penanggung dan 74 orang tertanggung yang berada di desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

5. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi. Sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 4 (empat) orang, yaitu mereka yang pernah melaksanakan pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem *brandu*. Diantaranya 3 (tiga) orang tersebut sudah pernah melakukan klaim atas asuransi tersebut dan 1 (satu) orang lagi adalah dari pihak penanggung asuransi di desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

¹²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 80.

6. Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁴

7. Analisis Data

- a. *Analisa Kualitatif*, yaitu “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

- b. *Deduktif*, yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum. Kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵
- c. *Content-analysis*, yaitu metode yang digunakan pikiran orang lain sehingga kita bisa menelusuri pemikirannya dengan baik. Penelitian ini digunakan untuk melihat struktur isi fakta-fakta dari fenomena yang terjadi dalam pembayaran klaim asuransi sapi sakit yang dijual dengan sistem brandu.



¹⁵Sutrisno Hadi, , *Metode Research.....*, h. 28.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Asuransi Konvensional

a. Pengertian Asuransi Konvensional

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut “*Assurantie*” yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut “*Assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.¹

Mengenai definisi dari asuransi secara baku dapat dilacak pada peraturan perundang-undangan dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi. Wirjono Prodojickoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia Memaknai asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2001), h 259.

yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.²

Definisi mengenai asuransi juga dapat dilihat dari Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau;
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 memberikan penjelasan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian

²AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 58-59.

yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

b. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia:³

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- 2) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Perusahaan Bersama;
- 4) PP No. 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi;
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 6) Keputusan Menteri Keuangan No. 224/KMK.017/1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 7) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Keputusan Menteri Keuangan No.

³*Ibid*, h. 83-85.

226/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;

- 8) Surat Keputusan Biro Tarif No. SK-03/BT/97 tentang Perubahan Tarif (Suku Premi) Asuransi Kebakaran Atas Objek-objek yang Tergolong “Industri Risk” dan “Non Industri Risk”;
- 9) Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
- 10) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.4/1995 Tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Pembayaran Premi Asuransi ke Luar Negeri;
- 11) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.4/1995 Tanggal 5 April 1995 tentang Tindak Lanjut Pertemuan Tanggal 11 Juli 1995;
- 12) Salinan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangi sebagai Biaya;
- 13) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE;20/PJ.4/1995 Tanggal 26 April 1995 tentang Besarnya Cadangan yang Boleh di bebaskan sebagai Biaya (Seri PPh Umum No. 8);
- 14) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

- 15) Keputusan Menteri Keuangan RI No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 16) Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

c. Jenis-Jenis Asuransi

Perusahaan asuransi membuat suatu kebijakan pengelompokan asuransi yang sesuai dengan fokus dan risiko. Hal tersebut memberikan ukuran dalam keseragaman pada risiko yang ditutupi oleh jenis dalam kebijakan yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi sebuah potensi kerugian dan menetapkan premi yang sesuai.

Bentuk yang paling umum dari kebijakan jenis-jenis asuransi yaitu sebagai berikut:⁴

1) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memberikan keuntungan finansial kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung. Berbagai bentuk asuransi jiwa yang dikeluarkan, beberapa menyediakan pembayaran hanya sesudah kematian tertanggung, sebagian perusahaan asuransi lain ada yang memungkinkan tertanggung

⁴www.gurupendidikan.com, Pengertian, Fungsi, Dan Jenis Asuransi Beserta 4 Tujuannya Terlengkap, Oleh Bitar, Posted On 24 Juni 2016, diakses pada 9 Mei 2020 pukul 10.10

dapat mengklaim dana sebelum kematiannya.

2) Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan adalah sebuah produk asuransi yang khusus menangani suatu masalah kesehatan yang diakibatkan sebuah penyakit dan menanggung suatu proses perawatan kepada tertanggung. Pada umumnya termasuk untuk melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan dapat dibeli untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

3) Asuransi Kendaraan

Asuransi yang sering digunakan mobil yakni asuransi terhadap cedera kepada orang lain atau terhadap suatu kerusakan pada kendaraan orang lain yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung. Asuransi mobil juga bisa membayar untuk kehilangan, atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.

4) Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti

Asuransi pemilik rumah untuk melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal. Asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan, atau kerusakan barang-barang tertentu milik pribadi. Hal tersebut termasuk untuk melindungi dan memberikan keringanan jika terjadi kecelakaan pada rumah seperti kebakaran dan lain sebagainya.

5) Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan adalah suatu solusi untuk menjamin suatu kehidupan masa depan. Misalnya, orang tua mengasuransikan pendidikan anak di masa yang akan datang. Biaya premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi tergantung pada jenis pendidikan yang ingin didapatkan.⁵

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk asuransi syariah, diantaranya *Islamic insurance* (dalam bahasa Inggris) dan dalam bahasa Arab digunakan istilah *takaful*, *at-ta'min*, *ad-dhaman* (*tadhamun*).⁶ Ketiga kata tersebut merupakan persamaan dari pengertian asuransi syariah yang memiliki makna saling menanggung, saling menolong. Dari ketiga kata tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Takaful*

Menurut bahasa, *takaful* berasal dari kata *kafala* yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dimaksud, yang katanya berasal dari *kafala-yakfulu-takafula*-

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.

⁶Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*,h. 91.

ya>ta>ka>fa>lu>-taka>ful, yang berarti saling menanggung, atau menanggung bersama.

Taka>ful dalam pengertian *fiqih*{*mu'a*>malah adalah saling memikul risiko diantara sesama muslim sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi tanggungan penanggung risiko yang lainnya.⁷

2) *Ta'mi>n*

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'mi>n*, penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'amanla>hu* atau *mustamin*. *At-ta'mi>n* (التَّامِينُ) diambil dari kata (أَمَّنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. *At-Ta'mi>n* artinya transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada tiap orang yang membayar iuran apabila suatu hal yang tidak diduga sebelumnya terjadi pada pihak pertama menurut kesepakatan yang sudah ditentukan.

Maksud dari dilakukannya perjanjian *ta'mi>n* adalah agar menghapuskan perasaan takut atau khawatir jika terjadi suatu hal yang tidak disangka dan tidak diinginkan, sehingga diasumsikan jika ada jaminan maka perasaan takut akan lenyap dan merasa mendapatkan perlindungan.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3.

3) *At-Tad{h\}a>mun*

At-Tad{h\}a>mun berasal dari kata *d{h}amana* yang artinya adalah saling menanggung. Yang bisa diinterpretasikan sebagai perlindungan atas bencana atau kejadian yang sudah terjadi terhadap diri seseorang. Pada pihak yang menanggung akan memberikan sesuatu sebagai pengganti kepada orang yang ditanggung (misalnya dalam bentuk uang ataupun barang) karena si tertanggung mengalami musibah. Dengan demikian kata *tad{h\}a>mun* dapat diartikan sebagai saling menolong (*ta'a>wun*), dimana beberapa orang yang saling tolong menolong jika orang lain atau saudaranya mengalami musibah.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syaria'h tentu tidak lepas dari dasar hukum yang menjadi pijakan program tersebut. Landasan hukum yang digunakan dalam asuransi syariah secara umum berdasarkan penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Berikut ini uraian-uraian dari beberapa dasar hukum tersebut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ الْحَشْرِ : ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-H}asyr : 18)⁸

Allah senantiasa memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan persiapan hari esok, karna hal itu sebagian dari kita berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak, sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat datang musibah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Ma'idah : 2)⁹

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk saling

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Panja Cemerlang, 2007),h. 106

⁹*Ibid*, h. 106

menolong dalam kebajikan dan takwa. Allah mengatakan barangsiapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dan bentuk yang lain. Karena itu dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'*.

2) Hadist

Dalam praktik asuransi syariah, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam Islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas merupakan suatu ibadah.¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ فَرَمَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا . (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehinggamenyebabkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10

uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘*a>qilahnya* (kerabat dari orang tua laki-laki)”.(HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik ‘*a>qilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. ‘*a>qilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *as{hobah{* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh ‘*a>qilahnya* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*taka>ful*) antara anggota suku.

Dengan adanya ‘*a>qilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-h{asan*) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai positif dalam praktik ‘*a>qilah* mendorong para ulama untuk bermufakat bahwa perbuatan semacam ‘*a>qilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam.¹¹

3) *Ijtiha>d*

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab.

¹¹Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Maneksi*, Vol. 8, No. 1, 2019, h. 172

Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat”. Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.¹²

4) *Ijma>*’

Ijma>’ yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara’ mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat.¹¹³ Para sahabat telah melakukan *ittifa>q* (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adanya *ijma>*’ atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. ‘*a>qilah*’ adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*‘as{hobah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa

¹²Wirdeyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*,...h. 194.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 62.

disimpulkan bahwa terdapat ijma dikalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.¹⁴

5) *Qiya>s*

Qiya>s adalah metode *ijtiha>d* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaani>llat (penyebab atau alasannya).¹⁵ Dalam Kitab Fath Al Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *a>qilah* diterima oleh Rasulullah Saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari '*a>qilah*' adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syari'ah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik '*a>qilah*'. '*a>qilah*' adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.

6) *Istih{sa>n*

Menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah menurut ulama ushul adalah beralihnya pemikiran

¹⁴Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*,.... h.122.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,....h. 74.

seseorang *mujtahid* dari tuntutan *qiya>s* yang nyata kepada *qiya>s* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.¹⁶ Seperti halnya kebaikan dari kebiasaan '*a>qilah* di kalangan Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

Muslehuiddin mengatakan manfaat signifikasi dari praktik '*a>qilah* tersebut adalah :¹⁷

- a) Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
- b) Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggota sesamanya.
- c) Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
- d) Menghindarkan dendam darah yang mengakibatkan kehancuran total.
- e) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan darah dan kerjasama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan saling membantu.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perss, 2003), h.104.

¹⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam....*h.124.

c. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika di bangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, asuransi harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut: ¹⁸

1) *Tauhi>d (Unity)*

Prinsip *tauhi>d (unity)* adalah prinsip dasar atau pondasi utama dari setiap bangunan yang terdapat dalam syariat Islam. Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Perlu diperhatikan dalam berasuransi yaitu bagaimana cara menciptakan suasana dan kondisi bermu'adalah yang berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan, setidaknya setiap melakukan aktivitas berasuransi ada keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak-gerik langkah kita dan tak luput berada bersama kita. ¹⁹

2) Tolong Menolong (*ta'ā>wun*)

Prinsip asuransi syariah yang berikutnya tolong menolong karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* yaitu

¹⁸AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*....h.125

¹⁹Nurul Huda dan Mohamad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik*.....h. 172

akad kebaikan.²⁰ Perintah saling tolong menolong terdapat dalam Q.S Al-Ma'idah[5]:2

3) Kerja Sama (*coorperation*)

Adapun kerjasama yang diterapkan di dalam asuransi syariah yaitu dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Adapun akad *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.

4) Kerelaan

Prinsip asuransi berikutnya adalah prinsip kerelaan, kerelaan bisa dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi, agar mempunyai motivasi sejak awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan agar tujuan utama membantu anggota asuransi yang lain dapat terwujud.²¹

5) Amanah

Prinsip yang seharusnya diterapkan dalam semua asuransi syariah adalah prinsip amanah yaitu bertanggung jawab

²⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*,.....h.99

²¹AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*....h. 131

(*responsibility*, transparansi, *trustworthy*). Prinsip amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.²²

6) Keadilan (*Justice*)

Prinsip selanjutnya yang harus diterapkan didalam asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan yang dimaksud dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.²³

7) Bebas Riba

Prinsip asuransi syariah selanjutnya adalah bebas riba. Tentu kita tahu setiap transaksi seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan seperti riba.²⁴ sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa> [4] : 29.

²²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*,.....h. 100

²³AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*....h. 132

²⁴*Ibid*, h. 133

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿النِّسَاءُ: ٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa>’ : 29)

8) Bebas *Garar* (Ketidakpastian)

Prinsip selanjutnya adalah bebas *garar*, secara bahasa berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasan. Menurut istilah *garar* adalah jual beli yang tidak jelas sesudahannya. Jadi, asas *garar* adalah ketidakjelasan.²⁵

Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa *garar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:

- a) Bentuk akad syari’ah yang melandasi penutupan polis;
- b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerima uang klaim itu sendiri.

²⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia*,.....h. 101

9) Bebas *Maisir* (Judi)

Allah SWT telah menegaskan terhadap keharaman melakukan aktivitas berekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi).²⁶ sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al-Ma'idah [5] :90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة : ٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

d. Sistem Klaim Asuransi Syariah

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak bertanggung setelah disetujui. Klaim asuransi bertujuan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis

²⁶AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*....h. 134

asuransi kepada pemegang polis (tertanggung).²⁷

Menurut Abdullah Amrin, klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya tersebut.

1) Proses Klaim

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien.

Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syari'ah maupun konvensional hampir sama. Kecuali dalam hal

²⁷Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 121

kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Prosedurnya adalah:²⁸

a) Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

b) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapatkan musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang untuk masing-masing *Class of Bussines*. Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi

²⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*...h. 260

dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

c) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survey akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dengan tertanggung.

d) Penyelesaian klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut. Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.

Perbedaan klaim antara asuransi syariah dan asuransi konvensional hanya terletak pada sumber pembayaran klaim. Pembayaran klaim pada asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Agar klaim asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan antara lain:²⁹

2) Klaim harus sesuai dengan yang tertera dalam polis

Sebelum mengajukan klaim asuransi, peserta harus memastikan masih memiliki manfaat yang sesuai dengan yang

²⁹Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 46

tercatat di dalam polis asuransi.

- 3) Polis masih berlaku (*Inforce*)
- 4) Polis tidak dalam masa tunggu
- 5) Klaim termasuk dalam pertanggungan
- 6) Faktor Batalnya Klaim Asuransi

Dalam proses penyelesaian klaim, menurut Herman Darmawi, “Ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi perusahaan asuransi jika dikonfrontasikan dengan suatu klaim, yaitu membayar dan menolaknya.

Ada dua hal yang mendasari perusahaan menolak pembayaran yaitu:

- a) Karena kerugian tidak terjadi;
- b) Karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian.

Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena di luar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.”

Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Salah satu penyebab klaim tidak bisa dilakukan adalah macetnya premi yang dibayarkan setiap bulannya. Asuransi konvensional mengenal

istilah uang hangus atau *loss premium*, yaitu peserta yang tidak sanggup lagi melanjutkan perjanjian atau putus di tengah perjanjian, tidak dapat menarik kembali uangnya karena uang tersebut oleh perusahaan asuransi telah dibebankan pada berbagai macam biaya penutupan sehingga polis tidak memiliki nilai tunai.

Dalam kondisi seperti ini, peserta berada posisi yang terdzalimi. Padahal dalam bermuamalah, tidak dibenarkan adanya praktik saling menzalimi. Oleh sebab itu, para ulama tidak membenarkan adanya praktik uang hangus. Asuransi syari'ah tidak mengenal adanya *loss premium* karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari peserta untuk mengelola dananya. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta tersebut masih dapat mengambil uang tabungannya.

e. Manfaat Asuransi Syariah

Terdapat beberapa manfaat asuransi syariah pada masyarakat, antara lain sebagai berikut:³⁰

- 1) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam

³⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*...h. 262

akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkan maka semakin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- 3) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.
- 4) Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu.

f. Risiko Asuransi Syariah

Dalam praktiknya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggunganan asuransi adalah sebagai berikut: ³¹

³¹Muh Fudhail Rahman, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Junal Al-Adalah*, Vol. X, No 1, 2011, h. 28

- 1) Risiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan.
- 2) Risiko investasi, adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan.
- 3) Risiko individu, dibagi dua macam:
 - a) Risiko pribadi, adalah risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati.
 - b) Risiko harta, adalah risiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.
- 4) Risiko tertanggung gugat, adalah risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

3. Perbedaan Asuransi konvensional dengan Asuransi Syariah

M. Sholahuddin mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Menurutnya, asuransi konvensional memakai dasar ikatan pertukaran, pertukaran yang dimaksud ialah pertukaran antara pembayar premi asuransi dengan uang pertanggungjawaban. Sedangkan beliau menjelaskan dalam syariat Islam, pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus

diterima sehingga tidak mengandung unsur ketidakpastian akad. Permasalahan pembayaran ganti rugi pada asuransi syari'ah, lainnya apabila putus ditengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa haknya yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim dan ketidakterbukaan. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi pelaksana kemudian diinvestasikan untuk usaha, jadi dasar pijaknya adalah sistem bunga, sehingga mengandung unsur riba. Hal ini dapat diketahui bahwa praktik asuransi menurut syariat Islam hukumnya adalah haram. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tiga keberatan dalam praktik asuransi konvensional yakni: *pertama*, *Maisir* atau untung-untungan; *kedua*, *garar* atau ketidakpastian; dan *ketiga*, ada unsur riba.³²

Muhammad Firdaus, menjelaskan bahwa dalam asuransi konvensional, *maisir* dapat timbul karena dua hal yakni: *pertama*, sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai *refreshing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebelum mencapai *refreshing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebesar 20% dan selebihnya hangus; serta *kedua*, apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat, maka perusahaan akan untung, tetapi jika salah dalam perhitungan maka akan rugi.

³²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Enkosa, 2013), h. 117.

4. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Desa Tri Tunggal Jaya

a. Organisasi Pelaksanaan

Penyelenggaraan AUTS, diperlukan pelaksana untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian pelaksana AUTS disusun sebagai berikut:

1) Pelaksanaan AUTS Pusat: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Pokja Asuransi Pertanian dan eselon 1 terkait:

- a) Merumuskan dan menyusun program asuransi pertanian;
- b) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
- c) Menerima usulan dan menetapkan peserta AUTS;
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS;
- e) Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan AUTS kepada Menteri Pertanian.

2) Pelaksanaan AUTS Provinsi: Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

- a) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya.

- b) Menerima usulan dari Dinas Kabupaten/Kota dan mengusulkan penetapan peserta asuransi kepada Ditjen PKH secara periodik;
- c) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS;
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS;
- e) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan AUTS kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3) Pelaksana AUTS Kabupaten Kota: Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

- a) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
- b) Melakukan pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi;
- c) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS;
- d) Mengusulkan peserta AUTS sebagai Daftar Peserta Definitif (DPD) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik;
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS;
- f) Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan AUTS kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

b. Tujuan dan Sasaran

- 1) Tujuan dibentuknya AUTS adalah untuk mengalihkan atau meminimalisir risiko kerugian usaha akibat sapi/kerbau mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.
- 2) Sasaran dibentuknya AUTS adalah dapat terlindunginya peternak sapi dan kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan agar peternak dapat melanjutkan usahanya.

c. Pelaksanaan

1) Kriteria

- a) Peternak sapi yang sedang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan;
- b) Sapi betina dalam keadaan sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
- c) Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Persyaratan

- a) Sapi harus memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag*, *necktag*, *micro-chip* atau lainnya);
- b) Peternak sapi harus bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari premi yang telah ditetapkan perundang-undangan; dan

- c) Peternak sapi harus bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi yang diberikan oleh asuransi pelaksana.

3) Pertanggungan AUTS

Risiko yang dijamin:

- a) Risiko mati karena penyakit;
- b) Risiko mati karena kecelakaan;
- c) Risiko mati karena beranak; dan
- d) Sapi hilang karena kecurian.

Ganti rugi:

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Terjadi kematian atas ternak sapi yang di asuransikan;
- b) Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.

4) Harga Pertanggungan

Merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Harga pertanggungan seluruh sapi. Harga Pertanggungan tersebut menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.

5) Premi Asuransi Ternak Sapi

Premi asuransi untuk asuransi ternak sapi untuk para peternak adalah sebesar Rp. 40.000,-/tahun/ekor. Premi asuransi tersebut berasal dari 20% dari harga pertanggungan yang sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per ekor per tahun. Peternak mendapatkan besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp. 160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,-/ekor/tahun. Besaran premi itulah yang harus dibayarkan peternak untuk tiap tahun dan tiap satu ekor sapi yang mereka asuransikan. Dalam perkembangannya iuran premi yang diambil dari nasabah mengalami kenaikan disetiap tahunnya yaitu Rp. 45.000,- pada tahun 2017, Rp. 50.000,- pada tahun 2018, dan Rp. 75.000,- pada 2019 sampai saat ini.

6) Jangka waktu pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak sapi.

d. Mekanisme Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaa Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan

melakukan pendataan dan pendampingan calon peserta AUTS yang melakukan usaha peternakan di wilayah binaannya.

- 2) Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pendataan calon peserta asuransi usaha ternak sapi, (yang data tersebut disebut Daftar Peserta Sementara/ DPS) yang kemudian selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (persero).

- 3) Perusahaan Asuransi Pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) bersama dengan Dinas yang melaksanakan sosialisasi kepada calon peserta AUTS untuk selanjutnya melanjutkan pendaftaran yang ditindak lanjuti dengan asesmen.

- 4) Apabila Perusahaan Asuransi Pelaksana dalam hal ini yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) menyetujui calon peserta AUTS sebagai peserta AUTS wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi Rp. 200.000,- yaitu menjadi Rp. 40.000,-/ekor/tahun. Asuransi Pelaksana sebagai bukti kepesertaan AUTS memberikan:

- 5) Bukti asli pembayaran premi swadaya;
- 6) Polis/sertifikat asuransi.
- 7) Perusahaan Asuransi Pelaksana menyampaikan rekapitulasi Polis yang telah diterbitkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan

dan kesehatan hewan untuk dijadikan dasar penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD).

- 8) Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS berdasarkan rekapan polis dari Perusahaan Pelaksana dan disampaikan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi secara periodik setiap bulan.
- 9) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dari masing-masing Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara periodik setiap bulan.
- 10) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dari masing-masing Provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 11) Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian.
- 12) Direktur jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN (Kantor Pelayanan

Pembendaharaan Negara) mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak kepada perusahaan asuransi pelaksana (PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung.³³

5. Dampak Mengonsumsi Daging Hewan Sapi Sakit Virus Jembrana Menurut Sains

Kasus permasalahan dari apa penyebab sapi yang diasuransikan mengalami sakit, serta tidak bisa memiliki persentase kesembuhan yang sangat minim yang terjadi di desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji ini adalah sapi terjangkit virus Jembrana.

Virus jembrana adalah penyakit hewan menular pada sapi. Penyakit ini bersifat akut dan menimbulkan tanda klinis yang jelas pada sapi bali (*Bos javanicus domesticus*), sedangkan pada jenis sapi lainnya hanya bersifat subklinis dan tidak menunjukkan tanda klinis yang nyata. Penyakit Jembrana merupakan penyakit yang hanya ditemukan di Indonesia, kasusnya pertama kali ditemukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada tahun 1964, dan kini telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.³⁴

Dari hasil pengujian di laboratorium Balai Veteriner Provinsi Lampung yang diambil dari beberapa sampel sapi yang terjangkit virus

³³Data Ikhtisar Pertanggungjawaban (Polis Asuranssi Ternak Sapi), PT Asuransi Jasa Indonesia.

³⁴Direktorat Kesehatan Hewan. *Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jembrana*, (Jakarta: Direktorat Kesehatan Hewan, 2015), h. 11.

jembrana ini. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Veteriner Lampung Suryantana saat ditemui di Balai Veteriner Lampung mengatakan, daging sapi yang mati karena terserang jembrana aman dikonsumsi. Meski demikian, ia mengingatkan untuk mengolah daging tersebut dengan benar. “Tidak menular ke manusia mas. Dagingnya juga masih bisa dikonsumsi,” jelasnya. Diungkapkan Surya, virus jembrana ini memang cukup mematikan untuk Sapi Bali. Karena dalam kurun waktu kurang dari satu minggu, sapi yang terserang virus jembrana akan mati. Meski demikian, masyarakat yang tinggal di daerah yang terjangkit virus jembrana tersebut tak perlu khawatir. Pasalnya, virus yang hanya menyerang Sapi Bali tersebut tidak menular ke manusia.³⁵

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.³⁶

Adapun ada beberapa laporan penelitian yang berkaitan dengan penulisan laporan penelitian ini yaitu :

Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Syanti Hardiyanti pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Klaim Asuransi Usaha Ternak

³⁵“Sapi Terjangkit Jembrana Masih Bisa Dikonsumsi” (On-line), tersedia di: <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2018/sapi-terjangkit-jembrana-masih-bisa-dikonsumsi/> (15 Oktober 2020).

³⁶Syanti Hardiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung)*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Sapi (AUTS)”. Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) KC Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan penanggung. Dalam kesimpulan dari penelitian terkait dengan klaim asuransi usaha ternak sapi ini adalah boleh (*mubah*) menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih *Al-maslahah Al-Mursalah* yang secara istilah berarti suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang kemaslahatan tersebut.

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Nurul Amalia pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit” studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan laporan penelitian lapangan atau *Field Research* yang bersifat deskriptif yang berisikan tentang bagaimana hukum Islam terkait dengan jual beli ternak kambing yang sakit. Adapun kesimpulan laporan penelitian ini adalah dilarang menurut hukum Islamnya. Sebab, ditinjau dari objek yang diperjualbelikan maka hukumnya *fasi>d*, karena syarat objek tersebut tidak terpenuhi oleh ketentuan *syara'*.³⁷

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh Imam Fatoni Prayoga pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)”. Merupakan laporan lapangan atau *Field*

³⁷Nurul Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit Tahun 2019 (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (On-line) tersedia di <http://repository.radenintan.ac.id/8002/1/SKRIPSI%20NURUL%20AMALIA.pdf>, diakses pada 5 Februari 2020.

Research yang bersifat deskriptif yang berisikan tentang bagaimana prosedur atau syarat untuk bisa mengikuti program asuransi usaha ternak sapi. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa syarat untuk mengikuti program asuransi usaha ternak sapi adalah bertanggung (peternak sapi) yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan, sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif. Serta untuk mengajukan klaim adalah apabila terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan 1 (satu) tahun, bertanggungsegera membuat laporan kehilangan atau kematian serta melengkapi form untuk mendapatkan klaim asuransi ternak sapi tersebut.³⁸

Sedangkan pada Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Sapi Sakit Yang Dijual Dengan Sistem *Brandu* (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)”. Merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yang bersifat deskriptif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana dalam penelitian ini lebih memfokuskan adanya asuransi usaha ternak sapi yang di mana salah satu syarat untuk memperoleh klaim asuransi tersebut, adalah jika sapi mati. Namun berbeda, saat ternak sapi tersebut belum saatnya mati (masih dalam keadaan sakit), dilakukan jual beli dengan sistem *brandu*/kegiatan swadaya masyarakat bersama untuk membeli sapi tersebut. Di mana pada perjanjian awal pihak asuransi akan memberikan sejumlah Rp. 10.000.000; maka jika sapi yang ditawarkan oleh masyarakat dengan sistem *brandu* senilai Rp.

³⁸Imam Fatoni Prayoga, *Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun 2018 Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*, (on-line) tersedia di <http://digilib.unila.ac.id/30979/>, diakses pada 5 Februari 2020.

2.000.000; maka pihak asuransi akan memberikan klaim sebesar Rp. 8.000.000; untuk menutupi kekurangannya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Panja Cemerlang, 2007.

Direktorat Kesehatan Hewan, *Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jembrana*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2015

Departemen Pendidikan Nasional, C. I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Buku

Ali, M, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Ali, Z, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

....., *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Amrin, A, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Darmawi, H, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Hadi, S, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Huda, Nurul, dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ja'far, K, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet 2016.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fisafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
-, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Khallaf, A. W, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Terjemah Talhah Mansyur*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
-, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemah Faiz el-Muttaqin*, Jakarta: RajaGrafindo Pers, 2000.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Soemitra, A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri 2017.
- Sudarsono, H, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta: Enkasia, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Wardi, A. M, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal

- Dinna Miftakhul Jannah & Lucky, Nugroho, Strategi Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Maneksi*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2019.
- Muhammad, Fudhail Rahman, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 1, Januari 2011.
- Muhammad, Tho'in, Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 1, 2015.

Wawancara

- Heri Gending, wawancara dengan salah satu tertanggung yang melakukan klaim asuransi sapi sakit Desa Tri Tunggal Jaya, 09 Maret 2020.

Marsudi, wawancara dengan salah satu penanggungjawab Asuransi Usaha Ternak Sapi di Desa Tri Tunggal Jaya, 08 Maret 2020.

Mastur, wawancara dengan Kepala Desa Tri Tunggal Jaya, 09 Maret 2020.

Nyoto Erwanto, wawancara dengan salah satu penanggungjawab Asuransi Usaha Ternak Sapi di Desa Tri Tunggal Jaya, 08 Maret 2020.

Purwanto, wawancara dengan salah satu tertanggung yang melakukan klaim asuransi sapi sakit Desa Tri Tunggal Jaya, 09 Maret 2020.

Saniran, wawancara dengan salah satu tertanggung yang melakukan klaim asuransi sapi sakit Desa Tri Tunggal Jaya, 08 Maret 2020.

Sumber Online

Bitar. *“Pengertian, Fungsi, Dan Jenis Asuransi Beserta 4 Tujuannya Terlengkap”*. (On-line) tersedia di : [www.gurupendidikan](http://www.gurupendidikan.com). (09 Mei 2020).

Imam Fatoni Prayoga. *“Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)”*. (On-line) tersedia di : <http://digilib.unila.ac.id/30979/>. (5 Februari 2020).

JawaPos, *“Sapi Terjangkit Jembrana Masih Bisa Dikonsumsi”* (On-line), tersedia di: <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/04/2018/sapi-terjangkit-jembrana-masih-bisa-dikonsumsi/> (15 Oktober 2020).

Nurul Amelia. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”*. (On-line) tersedia di : <http://repository.radenintan.ac.id/8002/1/SKRIPSI%20NURUL%20AMALIA.pdf>. (5 Februari 2020).

Wikipedia. *“Pengertian Pembayaran”*. (On-Line). tersedia di : https://id.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran. (22 Oktober 2019)

Wiktionary. *“Pengertian Klaim”*. (On-Line). tersedia di : <https://id.wiktionary.org/wiki/klaim>. (22 Oktober 2019)